

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Aceng, 2000, *Press Relation : Kiat-Kiat Berhubungan dengan Pers*, PT. Remaja Rostakarya, Bandung.
- Adji, Indriyanto Seno, 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta.
- Adji, I. S. Adji, dan W. S., 1995, *Pembatalan SIUPP sebagai Sengketa Tata Usaha*. M. Elrick (Ed). *Kapita Selekta Hukum Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, SH.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Ariel Heryanto, Harjono Tjitrosoebono, Aristides Katoppo, Ashadi Siregar, dan Muladi, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, Bintang, Yogyakarta.
- Djarmika, Prija, 2004, *Strategi sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya*, Bayumedia, Malang.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Girsang, Juniver, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & puKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Gramedia, Jakarta.
- Kusmadi, 2012, *Dewan Pers Periode 2010-2013*, Dewan Pers, Jakarta.
- Luwarso, Lukas (penyunting), 2003, *Kebebasan Pers dan Penegakan Hukum*, Dewan Pers, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Mengelola Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muarif, Syamsul, 2002, *Ancaman Kebebasan Pers*, Dewan Pers-UNESCO, Jakarta.
- Nugroho, Bakti dan Samsuri, 2013, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta.
- Pers, Dewan, *Kebebasan Pers Pasal-Pasal Penghinaan*, Dewan Pers-UNESCO, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satu, Berita, 2012, *Jurnalisme Positif : Panduan Kerja Para Jurnalis Berita Satu Media Holding*, Jakarta.
- Siregar, RH, 2002, *Delik Pers dalam Hukum Pidana*, Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta.

- Sukardi, Wina Armada, 1989, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Sularto, St., 2001, *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Kompas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Edy, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soebjakto, R., 1990, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, IND-HILL-Co, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Syaefullah, J. Heru Margianto dan Asep, 2014, *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*, AJI Indonesia, Jakarta.**
- Syahriar, Irman, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Surabaya.
- Syamsul, M.Romli dan Asep, 2012, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Utomo, Wisnu Prasetya, 2016, *Suara Pers, Suara Siapa?*, Pindai, Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Lawa) : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wiryawan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812).
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4714).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/ I/ 2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur pengaduan ke Dewan Pers.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 06/SKDP/IV/2006 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 14/SK-DP/VII/2011 tentang Penetapan PWI Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan.

Nota Kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers Nomor : 01/DP/MoU/II/2012, Nomor : 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Nomor KPI : 03/K/KPI/HK.03.02/04/2014, Nomor Dewan Pers : 03/DP/MOU/IV/2014 tentang Penanganan Pelanggaran Isi Siaran Jurnalistik.

### **C. Jurnal**

Ariman, M. Rasyid, *Kontroversi Asas Legalitas*, dalam Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Februari 2006.

Ariyanti, Vivi, *Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Edisi.4 No.1 Januari-Juni 2010.

Awaludin, Didik Supriyanto dan Iwan, *Pers dan Teknologi : Dejournalisasi di tengah konvergensi*, dalam Jurnal Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Vol 1 No.2 April 2007.

Harahap, Naungan, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pers (Pengalaman Seorang Wartawan)*, dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010.

Huda, Chairul, *Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*, dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010.

Loqman, Loebby, *Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010.

Mukantardjo, Rudy Satriyo, *Asas Praduga Tidak Bersalah Kesalahan Menurut Fakta dan Kesalahan Menurut Hukum*, dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010.

Sayoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

Sukardi, Wina Armada, *Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*, dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 2, November 2010.

#### **D. Skripsi/ Tesis/ Artikel/ Paper/ Makalah**

Arifin, Pupung, *Superioritas Media Online (Persaingan Tujuh Portal Berita Online di Indonesia : Sebuah Analisis Uses and Gratifications dan Competitive Superiority)*, 2012, dalam Tesis program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Dzulhijah, Pebri Tuwanto, Ikha Nur Diniawati, dan Liza, *Trial by The Press : Kebebasan Pers atau kebablasan Pers?*, 2014, dalam paper LPM Gema Keadilan, Semarang.

Fahmanadie, Daddy, *"Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Perbuatan yang Dikategorikan "Trial By The Press"*, 2010, dalam Tesis program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hardiyudanto, Bayu, *Penerapan Hukum Pidana terhadap pemberitaan Pers yang Dapat Memicu Konflik di Masyarakat*, 2011, dalam Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Kurniawan, Pratama, *Pengelolaan Media Online Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus Manajemen Situs Web Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, 2004, dalam Skripsi program sarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nugroho, Fajar Andi, *Penyimpangan Asas Praduga tak bersalah Berkaitan dengan Pemberitaan Pers dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2007, dalam Tesis program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putra, Atven Vemanda, *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, 2013, dalam Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Putri, Bernadetha Melinda Kirana, *"Interpretasi Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 310 KUHP"* 2015, dalam Skripsi program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ratna, Lidwina Galih Puspa, *Media Online Sebagai Pemenuh Kepuasan Informasi (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Mengenai Kepuasan Informasi bagi Kaum Wanita pada Media Online wolipop.com)*, 2012, dalam Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Saputra, Pandu E, *Perspektif Regulasi pada Media Online dan Tinjauan Pemblokiran*, 2015, dalam Makalah Mahasiswa PPs. Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sativa, Dian, *Media Online dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menggunakan Media Online Kompas.com dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS)*, 2010, dalam Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siahaan, Deffid Ivani, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1060/K/Pid/2008)*, 2014, dalam Jurnal program sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Syamsul, M.Romli dan Asep, 2014, *Disiplin Verifikasi dan Kredibilitas Media Online*, dalam artikel, Bandung.
- Tampati, Riko, *Pengaturan Tindak Pidana Cybercrime Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, 2012, dalam Skripsi program sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Teguh, Pri Pambudi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia*, 2014, dalam Laporan Penelitian., Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

#### **E. Media Cetak**

- Andalas, Harian, *Pencemaran Nama Baik H Anif : Ketua KNPI Sumut Tersangka*, Sabtu, 5 Maret 2016.
- Kurniawan, Aloysius Budi, *Ancaman UU ITE di Era Digitalisasi Makin Serius*, Kompas, Kamis, 2 Januari 2015.
- \_\_\_\_\_, *Media Cetak Abal-abal Bermikri ke Daring*, Kompas, Sabtu, 28 Februari 2015.
- Kompas, *Media Siber : Situs Berita Paslu Diblokir*, Kamis, 31 Juli 2014.
- \_\_\_\_\_, *Antisipasi Media "Abal-Abal"*, Jum'at, 2 September 2016.
- \_\_\_\_\_, *Penandaan Bukan untuk Hambat Kebebasan Pers*, Sabtu, 3 September 2016.
- \_\_\_\_\_, *Tak Perlu Pakai UU Pers*, Selasa, 13 September 2016.
- Nasir, Mohammad, *Sudut Pandang : Pendidikan Jurnalistik dan Pers "Abal-abal"*, Kompas, Kamis, 12 Februari 2015.
- Nazri, Subhan, *Pers dituntut Terus Mencerdaskan Masyarakat*, Kompas, Jumat, 11 Maret 2016.

Sudibyo, Agus, *MoU Dewan Pers-Polri*, Kompas, Rabu, 15 Februari 2012.

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 312/PDT.G/2004/PN.JKT.PST tanggal 3 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1608 K/PID /2005 tanggal 9 Februari 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009.

#### **G. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers**

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 21/PPR/-DP/XI/2015.

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 30/PPR-DP/VIII/2016.